

Strategi Pemerintah Desa dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Riyan Putra Izzuddin ^{1,*}; Agus Widiyarta ²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur; ryanizzi100@gmail.com;

agus_widiyarta.adneg@upnjatim.ac.id

*Correspondence : agus_widiyarta.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Strategi merupakan alat kekuasaan pemerintah yang memuat ide dan gagasan dalam mengatasi masalah, kerumitan dan kompleksitas dalam pemerintahan. Dalam hal ini, Desa Sruni melakukan upaya yang berhasil menekan angka stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan Pemerintahan Desa Sruni dalam upaya percepatan penurunan stunting. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Pemerintahan Desa Sruni tidak hanya berfokus pada upaya percepatan penurunan stunting yang dapat dilihat secara kuantitas, melainkan dengan output dapat menciptakan kemandirian pada masyarakat dalam berperilaku PHBS. Upaya ini didukung dengan sumber daya yang memadai mulai dari SDM, fasilitas sarana prasarana, dan anggaran yang optimal sehingga berimplikasi pada hasil yang positif dibuktikan dengan penurunan angka stunting di Desa Sruni hingga 8 (delapan) persen. Hal yang paling menonjol dalam keberhasilan strategi tersebut dikarenakan keaktifan dan kesungguhan TPK.

ABSTRACT

Strategy is a tool of government power that contains ideas and ideas in overcoming problems, complexity and complexity in government. In this case, Sruni Village made efforts that succeeded in reducing the stunting rate. This study aims to analyze the strategies carried out by the Sruni Village Government in an effort to accelerate stunting reduction. The research method used is descriptive qualitative which produces data in the form of written words from interviews, observation and documentation. The results showed that the strategy carried out by the Sruni Village Government does not only focus on efforts to accelerate the reduction of stunting that can be seen in quantity, but with the output of creating independence in the community in PHBS behavior. This effort is supported by adequate resources ranging from human resources, infrastructure facilities, and an optimal budget so that it has implications for positive results as evidenced by the reduction in stunting rates in Sruni Village to 8 (eight) percent. The most prominent thing in the success of this strategy is the activeness and seriousness of the TPK.

Kata kunci

Pencegahan Stunting, Strategi, Tata Kelola Pemerintahan Desa

Keywords

Stunting Prevention, Strategy, Village Governance

Pendahuluan

Indonesia telah mencapai kemajuan luar biasa dan bertransisi menjadi negara berpendapatan menengah. Namun, pencapaian di bidang gizi masih tertinggal dari aspek kesehatan lain yang terkait dengan tumbuh kembang anak. Jutaan anak dan remaja Indonesia masih menderita angka *stunting* dan *wasting* yang tinggi, serta mengalami 'beban ganda' akibat malnutrisi, baik dalam bentuk kurang gizi maupun lebih gizi (Unicef, 2019). Hal ini dipertegas oleh UNICEF, WHO, dan *World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates* (2018), masalah *stunting* merupakan permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang.

Stunting menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental (Unicef, 2013 dalam Lia, 2022). Beberapa studi menunjukkan risiko yang diakibatkan *stunting* yaitu penurunan prestasi akademik (Picauly & Toy, 2013), meningkatkan risiko obesitas (Timaesus, 2012; Djamin & Susanti, 2021), lebih rentan terhadap penyakit tidak menular dan peningkatan risiko penyakit degeneratif (Mustika & Syamsul, 2015). Artinya, kondisi *stunting* berdampak pada permasalahan kesehatan yang memperlihatkan masalah nyata dan serius (Tanoto Foundation, 2020).

Mengacu pada standar yang ditetapkan oleh WHO bahwa prevalensi *stunting* menjadi masalah kesehatan masyarakat jika prevalensinya 20% atau lebih. Berdasarkan data dari ADB dikutip Databoks (2021), diketahui bahwa pada tahun 2021 Indonesia merupakan negara kedua di ASEAN yang memiliki angka tertinggi prevalensi penderita *stunting* atau masih di atas 20% yaitu 24,4%. Angka tersebut mengindikasikan belum mencapai target WHO yaitu di bawah 20%. Merespon hal tersebut, pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Peraturan ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan prevalensi *stunting* menjadi 14 persen pada tahun 2024, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Melalui Perpres tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, yang di dalamnya menjelaskan bahwa Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu wilayah lokus *stunting* dengan prevalensi 24,8 persen berdasarkan hasil yang dirilis oleh Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memprioritaskan penanganan kasus *stunting* di beberapa desa yang tersebar di sejumlah kecamatan, salah satunya Desa Sruni di Kecamatan Gedangan. Desa Sruni dijadikan sebagai lokasi percontohan audit *stunting* karena berdasarkan hasil bulan timbang tahun 2020 persentase *stunting*

sebesar 29 persen, sedangkan hasil bulan timbang tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 8 persen (Surabaya.tribunnews.com, 2022).

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, Kader Posyandu Desa Sruni dalam menarik masyarakat agar aktif datang ke posyandu, maka diberikan edukasi dan konseling kepada balita, baduta, cantin (calon pengantin), bumil (ibu hamil), hingga lansia mengenai pemahaman terhadap pentingnya kesehatan anak. Selain itu, juga mendatangi rumah-rumah warga yang tidak aktif ke posyandu. Dari kunjungan tersebut, diketahui penyebab dari rendahnya keaktifan keluarga untuk membawa baduta dan balita ke Posyandu. Dengan demikian, keluarga yang berisiko *stunting* langsung dapat dilakukan pendampingan sehingga balita atau baduta tersebut bisa terlepas dari risiko *stunting*.

Dalam upaya mengatasi permasalahan di atas, keberhasilan Desa Sruni menjadi salah satu contoh bahwa pemerintah mampu mengatasi dan menekan angka *stunting*. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Svejfors et al., (2020) bahwa pada level makro, diperlukan kekuatan kebijakan, strategi, regulasi dan koordinasi antar sektor serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi isu-isu seperti pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pendidikan.

Strategi yang matang dan tepat dapat mengatasi permasalahan yang ada. Dalam hal ini, masalah *stunting* dianggap sebagai kasus yang perlu ditangani secara khusus mengingat dampaknya tidak hanya pada kesehatan seorang anak tetapi berdampak pada perkembangan kecenderungan produktivitas SDM di suatu daerah (Nirmalasari, 2020). Dengan demikian, anak-anak yang sehat, cerdas dan produktif merupakan aset penting karena mereka adalah generasi penerus untuk mendukung keberhasilan pembangunan negara (Wardita et al., 2021).

Adanya penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan peneliti yang membahas tentang strategi pemerintah dalam percepatan penurunan *stunting*, yaitu *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Azizah et al., (2022), yang menjelaskan bahwa strategi pelayanan kesehatan di Kabupaten Buton Selatan dalam menurunkan angka *stunting* belum berjalan dengan maksimal, karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan tidak terlalu mementingkan adanya *stunting*. Teori yang digunakan ialah teori strategi pemerintahan dari Robbins dalam (Kusdi, 2009). *Kedua*, penelitian Susanti & Mardhiah (2022) dengan temuan pemerintah melakukan 8 (delapan) aksi konvergensi *stunting* dan setiap aksi memiliki instrumen pelaksanaannya masing-masing dan pemberian juga melibatkan pemangku kepentingan untuk menjangkaunya. Fokus penelitian ini tidak hanya berfokus pada strategi pemerintah melainkan juga menganalisis perumusan kebijakan, kerjasama, dan penerapan 8 aksi konvergensi dengan *locus* penelitian di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang.

Ketiga, penelitian Putri & Sukmana (2022) dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa strategi pemerintah desa di Desa Kedungkendo Kecamatan

Candil Kabupaten Sidoarjo dalam pencegahan *stunting* belum tercapai, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya *stunting*, dan masyarakat kurang memahami tentang *stunting*. *Keempat*, penelitian Tasmal et al. (2023) yang berfokus pada pembahasan strategi percepatan penurunan *stunting* melalui program CSR (SI GINTING) PT Pertamina EP Rantau di Desa Kebun Rantau, Aceh. *Kelima*, penelitian Erlanda & Rahmadanik (2023) dengan temuan bahwa dalam menyusun strategi penurunan *stunting* menurut teori *collaborative governance* melalui fenomena proses kolaborasi yang dimulai dari melakukan dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara yang digunakan sudah berjalan cukup baik dan efektif. Dikatakan efektif karena adanya penurunan yang konsisten sesuai dengan keinginan Pemerintah Kota Surabaya.

Secara keseluruhan, terdapat perbedaan dengan kelima penelitian terdahulu di atas yang terletak pada *locus*, objek, dan fokus kajian. Kajian ini dilakukan di Desa Sruni, Kabupaten Sidoarjo dengan berfokus pada pembahasan strategi pemerintahan di tingkat Desa yang dikaji menggunakan teori strategi pemerintahan dari Mulgan (2009) dikutip oleh Putri & Sukmana (2022) yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu tujuan (*purpose*), lingkungan (*environment*), dan tindakan (*action*) membantu melihat permasalahan secara menyeluruh (*holistic*). Menurut Mulgan (2009), strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik atau melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Urgensi penelitian ini menggunakan teori strategi pemerintahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Wiyada et al., (2020), bahwa strategi publik memberi arah pemerintah berfikir dan bertindak dalam pemanfaatan sumber daya dan kekuatan publik secara sistematis untuk mencapai tujuan dan menemukan penanganan yang lebih efektif dan tepat sasaran pada masyarakat. Dalam pandangan teori strategi pemerintahan oleh Mulgan dapat menjelaskan dan memberikan suatu tolak ukur sebagai strategi pemerintahan dalam upaya percepatan penurunan *stunting*. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan Pemerintahan Desa Sruni dalam upaya percepatan penurunan *stunting*. Kontribusi studi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya percepatan penurunan *stunting* khususnya bagi Pemerintahan Desa lainnya di Kabupaten Sidoarjo sehingga bisa membawa dampak positif bagi masyarakat pada bidang kesehatan. Mengingat strategi untuk percepatan penurunan *stunting* di pedesaan disusun untuk menetapkan program-program dan intervensi kegiatan dengan fokus pada pencegahan dan penanganan gizi buruk dan kronis balita serta ibu balita agar tidak berlanjut menjadi kejadian *stunting* pedesaan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif. Pemilihan lokasi penelitian di Desa Sruni Kecamatan Gedangan didasarkan pada pertimbangan pencapaian Desa Sruni yang menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Sidoarjo berhasil menurunkan prevalensi *stunting* hingga 8 persen pada tahun 2022. Pengumpulan data berbasiskan data primer dengan observasi dan wawancara dengan menggunakan *purposive sampling* atau teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dari teknik tersebut, kemudian diperoleh informan diantaranya, yaitu: (1) H. Saiful Imamuddin, S.KM, M.Kes selaku Kepala Desa Sruni sekaligus koordinator pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*, (2) Rizky Mauliah Airlangga Putri, A.Md, Keb. selaku Penggerak dan Pembina Posyandu Desa Sruni, (3) Fissilmi selaku Ketua Posyandu Desa Sruni yang menghimbau dan menggerakkan masyarakat desa, dan (4) Fitriyani selaku Orang Tua Balita *Stunting*. Selain itu, juga diperoleh dari telaah literatur sekunder berupa jurnal, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dokumen, laman berita dari sumber-sumber yang kredibel, serta sumber lain yang relevan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan.

Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan Miles et al., (2019), meliputi 4 (empat) komponen yaitu 1) Pengumpulan data yang dikumpulkan melalui berbagai cara. 2) Kondensasi data sebagai proses yang mengarah pada pemilahan, pemfokusan, penyederhanaan data serta informasi yang telah dikumpulkan. Dari proses kondensasi data ini akan menghasilkan tulisan ringkasan. 3) Penyajian data melalui uraian singkat pendapat informan secara terpisah berdasarkan masalah penelitian, kemudian informasi tersebut disusun agar mudah dipahami. 4) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, berdasarkan informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang disampaikan oleh para informan dan telah melalui berbagai tahapan. Adapun uji validitas data menggunakan triangulasi dengan melakukan pengecekan data permasalahan *stunting* di Desa Sruni dari sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren (Creswell, 2019).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif mengenai topik permasalahan yang berkaitan dengan implementasi angkutan *feeder* WiraWiri sebagai sarana transportasi publik penunjang mobilitas masyarakat di Kota Surabaya dengan harapan bahwa hasil kajian ini dapat menjelaskan dengan jelas dan mudah untuk dipahami mengenai implementasi angkutan *feeder* WiraWiri sebagai sarana transportasi publik penunjang mobilitas masyarakat di Kota Surabaya. Lokasi penelitian, yaitu Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai instansi pemerintah yang menaungi *feeder* WiraWiri. Dasar pertimbangan peneliti menjadikan Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai lokasi penelitian karena didasarkan pada

masalah yang akan diteliti sehingga nantinya akan didapatkan hasil yang akurat dan teknik pemecahan masalah sesuai dengan objek yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Tujuan

Kondisi ideal menentukan tujuan dalam tahapan strategi pemerintah ini dijelaskan untuk dapat memahami mengapa tujuan tersebut menjadi sesuatu yang penting, kemudian apa yang membuat tujuan menjadi sebuah kebutuhan untuk dilaksanakan oleh organisasi tersebut dan harapan seperti apa yang ingin dimiliki dalam pelaksanaan tujuan tersebut (Mulgan dikutip Taryana, 2022). Dalam hal ini, Pemkab Sidoarjo melalui Surat Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif telah menetapkan lokus prioritas, yakni Desa Sruni sebagai salah satu sasaran prioritas percepatan penurunan *stunting* pada tahun 2021, 2022 dan 2023.

Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Desa Sruni adalah melalui Program Pencegahan dan Penanganan *Stunting* seperti melakukan pendampingan pada keluarga balita *stunting*, meningkatkan pengetahuan orang tua/pengasuh balita *stunting* tentang pencegahan *stunting* dan pola makan balita sesuai gizi seimbang dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), membentuk perilaku pola asuh balita yang baik untuk mendukung pencegahan *stunting*, serta meningkatkan kapasitas kader Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA). Program-program tersebut dinilai mampu membawa manfaat yang signifikan karena meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan dan mendorong kemandirian masyarakat dalam berperilaku PHBS serta memperoleh gambaran penyebab balita *stunting* dan cara mengatasinya. Sejalan dengan riset yang dilakukan Zakiah et al., (2024), bahwa untuk terlaksananya program peningkatan PHBS sebagai intervensi pencegahan *stunting* perlu adanya kesadaran dari masyarakat dengan bersinergi bersama tenaga kesehatan agar terhindar akan kejadian *stunting*.

Upaya percepatan penurunan *stunting* tidak akan maksimal apabila tidak dilakukan sosialisasi yang komprehensif dan tepat sasaran. Hal ini kemudian direspon oleh Pemerintah Desa Sruni dengan membuat *timeline* atau agenda terencana, terstruktur, dan tersistematis. Dari *timeline* tabel 1, dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Sruni melakukan sosialisasi 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanganan *Stunting*. Sosialisasi ini dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Desa Sruni yang di dalamnya terdapat Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan Puskesmas Ganting, Bidan Desa, Kader Posyandu dan Kader PMBA untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 10-

59 bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko *stunting* untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko *stunting*. Dalam berbagai kondisi, komposisi TPK dapat disesuaikan melalui bekerjasama dengan Bidan dari Desa lainnya di Kecamatan Gedangan atau melibatkan perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Berikut ini *timeline* kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Desa Sruni pada tabel 1:

Tabel 1. *Timeline* Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*

No.	Agenda	Bulan				
		8	9	10	11	12
1	Pelaksanaan bulan timbang dan penentuan sasaran pendampingan balita <i>stunting</i>	√				
2	Persiapan materi, alat dan bahan untuk pendampingan	√				
3	Pembekalan kader PMBA tentang teknis pendampingan		√			
4	Penentuan faktor risiko balita <i>stunting</i> dan cara mengatasinya		√			
5	Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanganan <i>Stunting</i>		√	√	√	
6	Monitoring dan evaluasi kegiatan		√	√	√	
7	Pencatatan dan pelaporan		√	√	√	√

Sumber: Sumber: Sekretariat Desa Sruni, Februari (2024)

Selain itu, Pemerintahan Desa Sruni memiliki rencana strategis untuk operasional data, penggerakan dan pendampingan keluarga di mana TPPS Desa Sruni sebagai organisasi percepatan penurunan *stunting* yang bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanganan *stunting* kepada sasaran masyarakat yang dilakukan oleh TPK. Menurut Kurniawati & Ardiansyah (2022); Nurfatimah et al., (2023), TPK ini sebagai langkah preventif dalam mengatasi permasalahan *stunting* dengan membantu jalannya komunikasi pada tenaga kesehatan dan memberikan edukasi kepada masyarakat dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan.

2. Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor keberhasilan dari strategi yang telah ditentukan dalam mencapai tujuan. Lingkungan juga sebagai lahan untuk perkembangan perilaku karena memiliki pengaruh yang besar terhadap individu. Kondisi ideal lingkungan dalam menganalisa lingkungan baik internal maupun eksternal dari instansi, memiliki arti sejauh mana kapasitas dari instansi pelaksana strategi tersebut untuk meresponnya (Mulgan dikutip Taryana, 2022).

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa Desa Sruni memiliki 8 (delapan) posyandu balita yang didukung dengan 40 kader, 1 (satu) pos gizi dengan 10 kader, dan 13 kader PMBA terlatih, dan kader KAP. Dengan sumber daya yang dimiliki, maka dari itu Pemerintah Desa Sruni menjalin kerjasama dengan pihak terkait, yaitu 1) Bidan Puskesmas Ganting, 2) Bidan Desa, 3) Kader Posyandu Balita, 4) Kader Pos Gizi, 5) Kader PMBA Terlatih, 6) Kader KAP, dimana keseluruhan pihak tersebut tergabung menjadi TPK serta dan 7) Masyarakat sebagai target sasaran.

Ditetapkan sasaran lingkungan yang menjadi lokus percepatan penurunan *stunting*, yaitu hanya di wilayah Desa Sruni yang didukung dengan sumber daya yang memadai. Diketahui sumber daya dalam TPPS Desa Sruni seperti tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Sumber Daya TPPS Desa Sruni

Profil Desa Sruni	Jumlah
Jumlah Posyandu Balita	8 Posyandu
Jumlah Kader Posyandu Balita	40 Kader
Jumlah Pos Gizi	1 Pos
Jumlah Kader Pos Gizi	10 Kader
Jumlah Kader PMBA Terlatih	13 Kader
Jumlah Kader Komunikasi Antar Pribadi (KAP)	4 Kader

Sumber: Sekretariat Pemerintah Desa Sruni, Februari (2024)

Gambar 1. Kerjasama dengan Para Stakeholder



Sumber: Dokumentasi Kegiatan Posyandu Desa Sruni

Masing-masing pihak memiliki pembagian peranan, misalnya Bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan. Kemudian Kader Posyandu Balita, Kader Pos Gizi, Kader PMBA Terlatih, Kader KAP sebagai penggerak dan fasilitator I (mediator) pelayanan-pelayanan bagi keluarga, di mana mereka secara bersama-sama melakukan penyuluhan tentang pola asuh balita, agar anak tumbuh sehat, aktif, cerdas dan tanggap. Dalam kegiatan tersebut, kader bisa memberikan layanan konsultasi, konseling, diskusi kelompok, dan demonstrasi (praktik) dengan orang tua/keluarga balita. Diharapkan kolaborasi tenaga kesehatan antara Bidan dan Kader Penggerak serta pemberdayaan keluarga dapat menjadi katalisator percepatan penurunan *stunting* di Desa Sruni.

Pelibatan beberapa pihak dalam pendampingan keluarga merupakan salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dalam menjangkau kelompok sasaran, yakni catin, ibu hamil dan menyusui, dan anak usia 10-59 bulan. Secara konsep, pendampingan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak balita, serta calon pengantin/calon pasangan usia subur untuk deteksi dini faktor risiko *stunting* dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan dari faktor tersebut (BKKBN, 2021). Menurut Sari et al., (2021) pendampingan pada keluarga berisiko *stunting* menjadi strategi yang efektif untuk

memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesiapan anggota keluarga untuk mencegah risiko *stunting*.

Kemudian, dalam menarik minat masyarakat agar aktif terlibat dalam program percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah Desa Sruni telah melakukan langkah yang bersifat holistik dan integratif melalui program “SI CANTING EMAS” dengan berfokus pada Aksi Kader PMBA cegah balita *stunting* demi generasi sehat berkualitas di Desa Sruni. Hal ini mengacu pada data proyeksi *stunting* yang dijadikan acuan untuk penanganan *stunting* melalui program tersebut, berikut ini data proyeksi *stunting* di Desa Sruni:

Tabel 3. Data Proyeksi Stunting di Desa Sruni

Profil Desa Sruni	Jumlah
Jumlah RT/RW	24 RT / 4 RW
Jumlah Penduduk Proyeksi	6.749 Jiwa
Jumlah Ibu Hamil Proyeksi	110 Ibu Hamil
Jumlah Sasaran Bayi Proyeksi	100 bayi
Jumlah Sasaran Baduta Proyeksi	205 anak
Jumlah Sasaran Balita Proyeksi	516 anak

Sumber: Sekretariat Pemerintah Desa Sruni, Februari (2024)

Upaya lainnya juga dilakukan untuk menarik masyarakat supaya aktif datang ke posyandu dengan dimulai inisiasi jemput boleh ke keluarga yang tidak aktif ke posyandu sebagai upaya deteksi dini cegah *stunting*. Pitayanti et al., (2022), mengatakan bahwa pentingnya investasi pencegahan *stunting* perlu dilakukan dengan upaya jemput bola melalui upaya deteksi dini cegah *stunting* pada balita di posyandu untuk memastikan SDM Indonesia di masa yang akan datang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi. Dengan begitu, dapat diketahui gambaran *database* kondisi *stunting* di Desa Sruni. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan edukasi dan konseling terkait PHBS.

3. Tindakan

Tindakan merujuk pada suatu langkah konkret yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan mengimplementasikan strategi (Mulgan dikutip Taryana, 2022). Dalam aksi upaya pencegahan *stunting* di Desa Sruni guna percepatan penurunan *stunting* diusahakan bersama antara pemerintahan desa dan masyarakat melalui partisipasi dan kepentingan pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan percepatan penurunan *stunting* melalui penetapan strategi kegiatan program “SI CANTING EMAS” yang diterapkan secara holistik dan terintegrasi.

Mekanisme pelaksanaan program “SI CANTING EMAS” secara teknis yaitu:

1. Menentukan sasaran pendampingan keluarga balita *stunting* dari hasil penimbangan
2. Mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan pendampingan balita *stunting*
3. Pembekalan oleh Tenaga Pelaksana Gizi dan Bidan Desa kepada kader MBA tentang teknis pendampingan keluarga balita *stunting*

4. Menentukan faktor risiko balita *stunting* dan cara mengatasinya bersama kader PMBA yang berasal dari kader posyandu dengan Tenaga Pelaksana Gizi yang berasal dari kader pos gizi, Bidan Desa, dan kader KAP
5. Melakukan pendampingan keluarga balita *stunting* dengan kunjungan rumah dan konseling PMBA sesuai dengan permasalahan yang ditemukan minimal 2 kali sebulan
6. Monitoring dan evaluasi berat badan dan tinggi badan balita serta setiap bulan kendala dan hambatan yang ditemukan saat pendampingan setiap bulan.

Setelah dilakukan pendampingan kader dari TPK diketahui bahwa perbaikan status gizi lebih banyak ditemukan pada balita dengan rentang usia 6 – 24 bulan, yang merupakan 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Kemudian masalah dalam pemberian makan yang ditemukan antara lain: 1) porsi makan anak belum sesuai kebutuhan, 2) jadwal makan tidak teratur, 3) konsumsi lauk hewani kurang, 4) variasi makanan kurang beragam, 5) ketersediaan pangan kurang karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang dengan banyak anggota keluarga, dan 6) orang tua paham tentang gizi seimbang, namun karena orang tua bekerja sehingga pengasuhan diberikan pada anggota keluarga lain atau pengasuh yang kurang paham tentang gizi seimbang pada anak.

Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa penanganan *stunting* di Indonesia harus dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi yang terjadi antara pemangku kepentingan. Upaya penurunan *stunting* akan lebih efektif apabila dapat dilakukan secara terintegrasi atau terpadu (Nisa, 2023).

Selain itu, juga ditemukan keluarga balita yang belum menerapkan PHBS dengan baik, tidak semua keluarga balita memahami tentang *stunting* dan cara pencegahannya serta gizi seimbang. Hal ini juga dikarenakan pemberian makan pada balita sebagian besar dilakukan oleh ibu / pengasuh serta peran ayah dalam pengasuhan balita / pemberian makan belum maksimal di beberapa keluarga balita *stunting*. Sejalan dengan penelitian Purwanti et al., (2023), bahwa ibu balita sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai praktik pemberian makan *responsive feeding*. Lebih dari 50 persen ibu mengalami kesulitan dalam praktik pemberian makan pada balita.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Pemerintahan Desa Sruni telah memiliki rencana tindak lanjut yakni merujuk balita *stunting* ke Puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan apabila tidak ada peningkatan berat badan atau sedang sakit saat dilakukan pendampingan dan merujuk balita *stunting* ke dokter spesialis anak apabila diperlukan sesuai dengan tata laksana. Hal tersebut telah dilakukan Pemerintahan Desa pada bulan Maret 2023 dengan melakukan pendampingan rujukan balita *stunting* ke RSUD Sidoarjo. Menurut Hendrawati, (2018), bahwa rencana tindak lanjut dinilai sangat penting sebagai antisipasi

pengecagan dan penatalaksanaan *stunting* pada anak apabila sumber daya yang dimiliki memiliki keterbatasan.

Setelah tahap awal pada program “SI CANTING EMAS” menunjukkan hasil yang kurang optimal, Pemerintah Desa mengambil langkah-langkah pencegahan strategis mulai dari memfokuskan kegiatan pada nutrisi yang seimbang untuk ibu hamil, pemberian asi eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI yang baik, perhatian pada kebersihan dan kesehatan lingkungan, pemantauan pertumbuhan anak, dan edukasi masyarakat.

Disamping Program “SI CANTING EMAS”, ditemukan bahwa berbagai tindakan telah dilakukan Pemerintahan Desa Sruni mulai dari Survei Kadarzi, Pelatihan dan Pembentukan Pos Gizi Desa Sruni, Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri di Pondok Al Barokah Desa Seruni, KP-ASI dan Kelas Ibu Hamil Desa Sruni, hingga Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal untuk Balita *Stunting*. Disisi lain, juga dilakukan pengadaan alat antropometri yang layak dan sesuai dengan standar untuk pengukuran tubuh balita. Melalui langkah-langkah pencegahan yang komprehensif ini, diharapkan dapat mengurangi angka *stunting* dan memberikan setiap anak kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Adapun pelaksanaan kegiatan Program Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Desa Sruni bersumber dari anggaran DAK Non Fisik BOK atau Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan. Bantuan dana ini berasal dari Pemerintah melalui Kemenkes untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan. Hal ini bersifat wajib untuk dibiayai BOK karena meliputi Kesehatan Ibu dan Anak, imunisasi, kemudian perbaikan gizi, promosi kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, pendampingan kader untuk ibu hamil risiko tinggi dan pendampingan kader untuk balita *stunting* dari Puskesmas. Ada juga kegiatan penunjang seperti kegiatan Poskesdes dan Posyandu, rapat koordinasi lintas sektor terkait pencegahan *stunting*, orientasi kader kesehatan, pelatihan penyegaran kemampuan kader dalam pemantauan tumbuh kembang oleh Puskesmas dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan audit kasus *stunting* di Desa Sruni pada tahun 2022 dan 2023. Audit kasus *stunting* merupakan salah satu kegiatan prioritas yang bertujuan mengidentifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya yang diharapkan dapat berperan dalam penanggulangan *stunting* secara komprehensif sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi (Syahrinullah et al., 2024). Audit kasus *stunting* ini sebagai salah satu strategi yang bertujuan untuk mengetahui cakupan analisa atas hasil pemantauan dan evaluasi yang berfokus pada kemajuan pencapaian hasil, faktor yang berkontribusi/mendukung atau menghalangi pencapaian hasil, serta penguatan desain strategi program dan kegiatan/intervensi yang selama ini dilakukan oleh Pemerintahan Desa Sruni. Hal tersebut juga

sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, bahwa agar siklus terjadinya *stunting* dapat dicegah, perlu ada formulasi kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada, satu diantaranya adalah audit kasus baduta *stunting* (Amelia et al., 2023).

Proses audit kasus *stunting* di Desa Sruni telah mencapai tahap evaluasi tindak lanjut pada sasaran audit balita *stunting* dan dilakukan pendampingan, dianalisis bersama pakar dari kasus-kasus di atas bersama dengan DP3AKB Sidoarjo. Hal ini menunjukkan komitmen yang sangat baik dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Desa Sruni. Dengan demikian, audit kasus *stunting* dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*. Disisi lain, juga memberikan *feedback* atau umpan balik serta menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

Setelah langkah-langkah pencegahan *stunting* secara holistik dan terintegrasi dilakukan, dapat diketahui hasil secara keseluruhan program dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Desa Sruni selama 4 (empat) tahun terakhir:

Tabel 4. Target dan Capaian Program di Desa Sruni

Hasil Capaian Program	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah sasaran balita	562	570	516	530
Jumlah balita yang ditimbang rata-rata setahun (D/S)	295	334	273	429
Persentase D/S (%)	52,49%	58,9%	52,9%	80,9%
Jumlah balita yang diukur tinggi badannya	292	329	410	428
Jumlah balita <i>stunting</i>	64	60	29	31
Persentase balita <i>stunting</i>	21,9%	18,2%	7,1%	7,24%
Target % Balita Stunting Kabupaten Sidoarjo	< 24%	< 21,1%	< 18,4%	< 16%

Sumber: Sekretariat Pemerintah Desa Sruni, Februari (2024)

Berbagai tindakan yang diambil oleh Pemerintahan Desa Sruni dari tahun 2020 hingga tahun 2023 menunjukkan hasil capaian program yakni terdapat penurunan jumlah balita *stunting* dari 64 anak (21,9 persen) pada tahun 2020 menjadi 31 balita *stunting* (7,24 persen) pada tahun 2023. Hal ini tidak terlepas dari hasil pengukuran tinggi badan dan penimbangan oleh kader, divalidasi oleh petugas puskesmas dan bidan desa dan adanya alat antropometri sesuai dengan standar bekerja sama dengan petugas puskesmas yang didukung dengan kemampuan kader dalam pemantauan tumbuh kembang.

Kesimpulan

Strategi yang dilakukan Pemerintahan Desa Sruni tidak hanya berfokus pada upaya percepatan penurunan *stunting* yang dapat dilihat secara kuantitas, melainkan dengan *output* dapat menciptakan kemandirian pada masyarakat dalam berperilaku PHBS. Dapat dilihat strategi tujuan yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan intervensi gizi terintegrasi secara spesifik yang bertujuan untuk

memastikan kecukupan gizi ibu hamil dan anak serta penurunan faktor risiko infeksi dan intervensi gizi sensitif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan keamanan pangan. Kedua intervensi tersebut telah disusun secara tepat waktu dan tepat sasaran melalui agenda *timeline* kegiatan percepatan penurunan *stunting*.

Strategi lingkungan diwujudkan melalui pembentukan TPPS Desa yang mengkoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh TPK. Dengan harapan kolaborasi tenaga kesehatan Bidan dan Kader Penggerak serta pemberdayaan keluarga dalam keterlibatan kegiatan yang bersifat edukasi dan konseling dapat menjadi katalisator percepatan penurunan *stunting* di Desa Sruni. Berbagai strategi tindakan dilakukan Pemerintahan Desa Sruni sebagai bentuk langkah pencegahan yang bersifat holistik, terintegrasi, dan komprehensif. Upaya ini didukung dengan sumber daya yang memadai mulai dari SDM, fasilitas sarana prasarana, dan anggaran yang optimal sehingga berimplikasi pada hasil yang positif dibuktikan dengan penurunan angka *stunting* di Desa Sruni. Hal yang paling menonjol dalam keberhasilan strategi percepatan penurunan *stunting* dikarenakan keaktifan dan kesungguhan TPK. Rekomendasi yang dapat diberikan, yakni strategi yang dilakukan Pemerintahan Desa Sruni dapat menjadi *best practice* bagi Pemerintah Desa lainnya di wilayah yang memiliki angka *stunting* tinggi dengan memperhatikan karakteristik daerah dan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk hadir ke posyandu terutama dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Pemerintahan Desa perlu melatih kader untuk membuat kegiatan di Posyandu menyenangkan dan tidak membosankan sebagai bentuk peningkatan kapasitas kader. Hal ini penting untuk memperhatikan keberlanjutan hasil yang telah dicapai. Sehingga angka kehadiran baduta dan balita di Posyandu bisa terpenuhi semaksimal mungkin.

Referensi

- Amelia, C., Ropik, A., & Azzuhri, H. (2023). Strategi Politik Nadiem Makarim Dalam Mengembangkan Pendidikan. *Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL)*, 19(2), 161–171. <https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i2.16396>
- Azizah, N., Nastia, & Sadat, A. (2022). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderitaan Stunting di Kabupaten Buton Selatan. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4145–4152. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i12.1518>
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan*. Disusun oleh Tim Kementerian Dalam Negeri, Tim Kementerian Kesehatan, Tim Kementerian Desa PDTT, Tim BKKBN, Tim TP PKK, Tim IBI. Diterbitkan oleh Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Databoks. (2021). *Prevalensi Stunting Balita Indonesia Tertinggi ke-2 di Asia Tenggara*. Berita 25 November 2021. *Katadata.co.id*. Diakses 17 Januari 2022 pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/prevalensi-stunting-balita-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asia-tenggara>
- Djamin, C. R., & Susanti, E. N. (2021). Pengaruh Kesejahteraan, Sarpras Ketersediaan Pangan, Akses Air Bersih dan Tenaga Kesehatan Terhadap Prevalensi Stunting di Kota Batam. *Jurnal Bening*, 8(2), 1–15. <https://doi.org/10.33373/bening.v8i2.3658>
- Erlanda, V., & Rahmadanik, D. (2023). Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 26(2), 90–97. <https://doi.org/10.30649/aamama.v26i2.160>
- Hendrawati, S. (2018). Pemberdayaan Kader Kesehatan dalam Pencegahan dan Penatalaksanaan Stunting pada Anak di Wilayah Kerja Puskesmas Jatinangor. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 7(4), 274–279. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v7i4.19527>
- Kurniawati, N., & Ardiansyah, R. Y. (2022). Peningkatan Pengetahuan Kader TPK (Tim Pendamping Keluarga) Kota Mojokerto Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsinya Melalui Transfer Iptek. *Jurnal Bhakti Civitas Akademika*, 5(1), 46–57. <https://doi.org/10.56586/jbca.v5i1.193>
- Kusdi. (2009). *Teori Organisasi dan Administrasi*. Salemba Humanika.
- Lia, S. (2022). Permasalahan Anak Pendek (Stunting). *JPM (Jurnal Pengabdian Mandiri)*, 1(4), 621–626. <https://bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/1995>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications Inc.
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*. Oxford University Press Inc.
- Mustika, W., & Syamsul, D. (2015). Analisis Permasalahan Status Gizi Kurang Pada Balita di Puskesmas Teupah Selatan Kabupaten Simeuleu. *Jurnal Kesehatan Global*, 2(6), 254–261. <https://doi.org/10.33085/jkg.v1i3.3952>
- Nirmalasari, N. O. (2020). Stunting Pada Anak : Penyebab dan Faktor Risiko Stunting di Indonesia. *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, 14(1), 19–28. <https://doi.org/10.20414/Qawwam.v14i1.2372>
- Nisa, L. S. (2023). Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(2), 217–231. <http://jkpjjournal.com/index.php/menu/article/view/78>
- Nurfatimah, N., Longgupa, L. W., & Ramadhan, K. (2023). Pemberdayaan Tim Pendamping Keluarga untuk Penurunan Stunting. *Poltekita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 862–869. <https://doi.org/10.33860/pjpm.v4i3.2845>

- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, Tanggal 5 Agustus 2021.
- Picauly, I., & Toy, S. M. (2013). Analisis Determinan Dan Pengaruh Stunting Terhadap Prestasi Belajar Anak Sekolah Di Kupang Dan Sumba Timur, NTT. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 8(1), 55–62. <https://doi.org/10.25182/jgp.2013.8.1.55-62>
- Pitayanti, A., Mulyati, S. B., & Umam, F. N. (2022). Deteksi Dini Cegah Stunting (“Deni Cheting”) Pada Balita Di Posyandu Krajan II. *Jurnal Bhakti Civitas Akademika*, 5(1), 24–30. <https://doi.org/10.56586/jbca.v5i1.167>
- Purwanti, R., Margawati, A., Wijayanti, H. S., Rahadiyanti, A., Kurniawati, D. M., & Fitranti, D. Y. (2023). Strategi Peningkatan Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Responsive Feeding untuk Pencegahan Stunting pada Balita. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 270–280. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v7i2.5874>
- Putri, F. F., & Sukmana, H. (2022). Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting di Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 224–235. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5168>
- Sari, D. W. P., Yustini, M. D., Wuriningsih, A. Y., Kholidah, K., Khasanah, N. N., & Abdurrouf, M. (2021). Pendampingan pada Keluarga dengan Anak Berisiko Stunting di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Semarang. *International Journal of Community Service Learning*, 5(4), 282–289. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v5i4.41523>
- Surabaya.tribunnews.com. (2022). 29 Desa di Sidoarjo Jadi Prioritas Penanganan Stunting. Berita 9 Agustus 2022. *Surya.co.id*. Diakses 1 Maret 2023 pada <https://surabaya.tribunnews.com/2022/08/09/29-desa-di-sidoarjo-jadi-prioritas-penanganan-stunting>
- Susanti, M., & Mardhiah, N. (2022). Strategi Pemerintah Simeulue dalam Penanganan Prevalensi Stunting pada Anak Balita. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.32>
- Svefors, P., Pervin, J., Islam Khan, A., Rahman, A., Ekström, E. C., El Arifeen, S., Ekholm Selling, K., & Persson, L. Å. (2020). Stunting, recovery from stunting and puberty development in the MINIMat cohort, Bangladesh. *Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics*, 109(1), 122–133. <https://doi.org/10.1111/apa.14929>
- Syahrinullah, S., Evawaty, E., Hamzah, N. C. H., & Zulfatmah, Z. (2024). Tinjauan Analisis Hasil Intervensi dan Audit Kasus Stunting pada Ibu Hamil di Wilayah Lokus Kabupaten Majene. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Kesehatan*, 7(1), 127–134. <https://doi.org/10.56467/jptk.v7i1.131>
- Tanoto Foundation. (2020). *Stunting, Ancaman bagi Masa Depan Anak-anak Indonesia*. Berita 9 Juni 2020. Diakses 4 April 2022 pada <https://www.tanotofoundation.org/id/news/stunting-ancaman-bagi-masa->

- depan-anak-anak-indonesia/
- Taryana, A. (2022). Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Aplikasi E-Office. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 4(1), 114–121. <https://doi.org/10.24198/janitra.v4i1.52869>
- Tasmat, D., Putranto, N. D., Rahmadani, R. A., & Kusuma, O. M. (2023). Strategi Percepatan Penurunan Stunting Melalui Program CSR PT Pertamina EP Rantau. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(9), 946–955. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i9.821>
- Timæus, I. M. (2012). Stunting and obesity in childhood: A reassessment using longitudinal data from South Africa. *International Journal of Epidemiology*, 41(3), 764–772. <https://doi.org/10.1093/ije/dys026>
- Unicef. (2019). *Gizi di Indonesia*. Diakses 28 Februari 2023 pada <https://www.unicef.org/indonesia/id/status-anak-dunia-2019>
- UNICEF / WHO / World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates. (2018). Levels and Trends in Child Malnutrition. *Joint Child Malnutrition Estimates 2018 Edition*, 1–16.
- Wardita, Y., Suprayitno, E., & Kurniyati, E. M. (2021). Determinan Kejadian Stunting pada Balita. *Journal Of Health Science (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 6(1), 7–12. <https://doi.org/10.24929/jik.v6i1.1347>
- Wiyada, R. A., Kartini, D. S., & Mulyawan, R. (2020). Strategi Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2018. *Jurnal Moderat*, 6(3), 611–623. <https://doi.org/10.25157/moderat.v6i3.3494>
- Zakiah, L., Awalia, M., Putri, E., Nurhayati, S., Ardiani, T., & Nabila, W. (2024). Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Sebagai Intervensi Pencegahan Kejadian Stunting di RW 03 Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Tahun 2024. *NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 17–25. <https://doi.org/10.55606/nusantara.v4i2.2617>